

Konflik Sosial dan Politik Identitas sebagai Kecacatan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017

Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global,
Universitas Budi Luhur
Jakarta, Indonesia
arsenius.wisnu@budiluhur.ac.id

Abstrak: Konflik sosial merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam masyarakat. Meski demikian, dampak dan tingkat keparahan yang ditimbulkan sering kali masif dan destruktif. Permasalahannya adalah Indonesia memiliki sebuah rekam sejarah yang buruk dalam kontestasi politik nasional, yaitu politik identitas dan politisasi agama. Pesta demokrasi pada kenyataannya sangat rentan untuk disusupi berbagai kepentingan dan “agenda” tertentu yang pada akhirnya memunculkan beragam konflik. Dinamika politik dan keanekaragaman identitas seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menyebabkan berbagai konflik horizontal dan vertikal yang terjadi di Indonesia. Studi kasus yang digunakan adalah Pilkada DKI Jakarta 2017, berkaitan dengan politik identitas, konflik sosial, dan mobilisasi sumber daya untuk gerakan sosial yang destruktif sebagai sebuah pembuktian terhadap kecacatan demokrasi. Teori Konflik, Pemikiran Kelompok, dan Teori Mobilisasi Sumber Daya digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian terhadap studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berupa studi kasus. Sumber data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia sangat mudah terprovokasi dengan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan identitas. Demokrasi justru memberikan dampak eskalasi konflik sosial yang lebih masif yang didasarkan pada keberagaman identitas, kepentingan, kelompok, dan egoisme individu. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk membentuk sebuah pemikiran subjektif yang dominan dan berujung pada mobilisasi massa yang destruktif.

Kata Kunci : Konflik sosial; Politik Identitas; Pemikiran Kelompok; Mobilisasi Massa yang Destruktif

Abstract: Social conflict is a common thing in society. However, the impact and severity that is often caused are massive and destructive. The problem is that Indonesia has a bad historical record in national political contestation, namely identity politics and the politicization of religion. Democratic parties are in fact very vulnerable to being infiltrated by various interests and certain "agendas" which in turn give rise to various conflicts. Political dynamics and diversity of identities such as ethnicity, religion, race and intergroup (SARA) have caused various horizontal and vertical conflicts that have occurred in Indonesia. The case study used is the 2017 DKI Jakarta Pilkada, related to identity politics, social conflict, and resource mobilization for destructive social movements as proof of democracy. Conflict Theory, Groupthink, and Resource Mobilization Theory are used as analytical tools in the study of case studies. This research uses a descriptive qualitative

approach in the form of a case study. The source of data in this study is secondary data collected through library research. Based on the results of the analysis that has been carried out, this study concludes that Indonesian people are very easily provoked by sensitive issues related to identity. Democracy actually has a more massive impact on the escalation of social conflict based on the diversity of identities, interests, groups, and individual egoism. This is used by certain groups to form a dominant subjective thought and leads to destructive mass mobilization.

Keywords: Social Conflict; Identity Politics; Groupthink; Destructive Mass Mobilization

Pendahuluan

Indonesia saat ini sedang menyongsong Pemilihan Umum 2024. Acara lima tahun sekali ini selalu diadakan oleh Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Fenomena sosial yang dapat dikatakan sebagai pesta demokrasi ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan, keadilan, dan penyerapan aspirasi masyarakat yang menyeluruh bagi bangsa Indonesia. Selain itu, terdapat hak mendasar bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memilih dan dipilih menjadi wakil-wakil rakyat yang mengemban amanat untuk memajukan Indonesia sebagai salah satu cita-cita dari negara yang merdeka dan berdaulat penuh.

Meski demikian, sering kali konflik muncul di dalam masyarakat. Pesta demokrasi pada kenyataannya sangat rentan untuk disusupi berbagai kepentingan dan “agenda” tertentu yang pada akhirnya memunculkan beragam konflik. Dinamika politik dan keanekaragaman identitas seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menyebabkan berbagai konflik horizontal dan vertikal yang terjadi di Indonesia. Terlebih lagi, hal ini semakin diperparah dengan hadirnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan identitas dan pandangannya masing-masing yang saling bertentangan. Menguatnya polarisasi masyarakat Indonesia terhadap suatu identitas tertentu telah berdampak pada penguatan politik identitas.

Demokrasi yang pada awalnya ditujukan sebagai penyampaian aspirasi dan harapan kian berubah menjadi arena pertarungan politik, dimana para calon elit politik saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Beragam alasan dan argumen semakin diperkuat dengan latar belakang yang dimiliki oleh elit politik telah digunakan dalam rangka mendapatkan simpati dan suara dari masyarakat Indonesia, salah satunya adalah agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik identitas politik dan agama dapat mengganggu stabilitas negara (Lestari, 2018). Beragam propaganda, isu, dan klaim kebenaran yang dinyatakan oleh masing-masing kelompok sering kali bertentangan dan menyebabkan konflik yang sangat besar.

Konflik memiliki empat aspek dan pada setiap aspeknya, konflik memiliki definisi yang berbeda pula. Konflik mengandung empat aspek, yaitu aspek psikologis, aspek politik, aspek sosial, dan aspek antropologis (Cosser, 1968). Secara umum,

konflik dapat didefinisikan sebagai hasil dari interaksi yang memiliki tujuan di antara dua pihak atau lebih dalam pengaturan yang kompetitif (Oberschall, 1978). Sedangkan konflik dalam aspek sosial, atau konflik sosial, sendiri di sini telah didefinisikan dalam berbagai bentuk. Artian sosial di dalam konflik sosial ini lebih mengacu pada konflik yang dilakukan oleh sekelompok orang seperti kelompok, organisasi, komunitas, dan orang-orang yang berkerumun (Oberschall, 1978). Interaksi merupakan cara yang dipilih oleh suatu kelompok untuk mengejar apa yang menjadi tujuannya. Perbedaan tujuan yang berada pada keadaan yang kompetitif merupakan alasan mendasar mengapa konflik sosial dapat terjadi di dalam masyarakat.

Politik identitas, khususnya politisasi agama, sangat rentan untuk terjadi lagi di Indonesia. Beragam tindakan represif dan provokatif dari suatu kelompok tertentu akan meningkatkan konflik sosial yang dapat berujung pada disintegrasi bangsa (Nurhadiyanto dan Puspita, 2021), khususnya fenomena politisasi agama pada masa pesta demokrasi. Terlebih lagi pada saat ini Indonesia sedang mempersiapkan pesta demokrasi lima tahunan sekali, berupa Pemilihan Umum 2024. Salah satu politik identitas yang marak terjadi di Indonesia adalah politisasi agama, atau penggunaan identitas agama sebagai alat politik. Fenomena politisasi agama terbesar di Indonesia terjadi pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI tahun 2017, dengan calon gubernurnya adalah Basuki Tjahaya Purnama, Anies Rasyid Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini diperparah dengan kasus penodaan agama yang menjerat salah satu calon, yaitu Basuki Tjahaya Purnama, pada saat masa kampanye menyebabkan tajamnya sentimen agama pada kompetisi elektoral DKI Jakarta pada tahun 2017 (Kurniawan, 2018). Hal ini menimbulkan mobilisasi massa dalam Aksi 411 dan 212 di Jakarta sebagai bukti nyata penguatann solidaritas kelompok Muslim di Indonesia.

Penelitian terdahulu terkait politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dilakukan oleh Anggraeni dan Adrinoviarini (2020) menyatakan bahwa media sosial memiliki peranan yang vital dalam proses ini. Media sosial telah digunakan sebagai sarana informasi berita, khususnya politik. Beragam informasi, baik positif maupun negatif, dapat tersebar dengan luas dan cepat. Setidaknya tindak pidana siber berupa ujaran kebencian yang masuk ke dalam kategori pencemaran nama baik telah mencapai 234 kasus pada tahun 2017. Khusus wilayah DKI Jakarta, mayoritas laporan yang diterima adalah kasus ujaran kebencian dan berita bohong, atau *hate speech* dan *hoax*. Penelitian tersebut menyatakan bahwa hal ini dapat terjadi karena media sosial telah digunakan sebagai ajang kampanye bagi pasangan calon.

Argumen ini juga didukung oleh penelitian lain yang serupa. Penelitian Utami dan Darmaiza (2020) menyatakan bahwa ujaran kebencian, atau *hate speech*,

merupakan salah satu bentuk *hate crime* yang banyak terjadi di media sosial. Penelitian kualitatif dengan metode *content analysis* terhadap dua media sosial berupa Facebook dan Instagram ini menyimpulkan bahwa fenomena politisasi agama dapat terjadi karena memiliki orientasi terhadap ideologi tertentu. Tak jarang juga masyarakat menyebar isu yang tidak benar bila ditemukan orang yang mendukung Ahok, seperti dengan cara mengancam untuk tidak mensholatkan jenazah yang memilih penista agama, memilih Ahok sama dengan kafir, orang yang memilih Ahok tidak akan dipedulikan oleh umat Islam lain, dan sebagainya. Kasus politisasi agama pada kenyataannya terjadi kembali pada Pemilihan Umum 2019 untuk menentukan Presiden Indonesia periode 2019-2024. Meski demikian, ujaran kebencian dan mobilisasi massa yang terjadi pada Pemilihan Umum 2019 tidak semasif Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 sebelumnya.

Hal yang lebih menarik ditemukan pada penelitian milik Scrivens, dkk. (2020) yang berjudul “*Triggered by Defeat or Victory? Assessing the Impact of Presidential Election Results on Extreme Right-Wing Mobilization Online*”. Penelitian kualitatif dengan studi kasus perbandingan Pilpres Amerika Serikat tahun 2008 dan 2016 pada kenyataannya cukup signifikan. Pada kedua kasus tersebut, ditemukan bahwa mobilisasi ekstrimis sayap kanan, atau *Right-Wing Extremists* (RWE) memiliki pola fluktuasi yang serupa. Meski demikian, Pilpres Amerika Serikat tahun 2008 memiliki jumlah mobilisasi daring yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini berkaitan dengan isu rasial serta *hate crime* terhadap calon presiden Amerika Serikat 2008, yaitu Barack Obama. Dinamika pemilihan Barack Obama telah diasosiasikan sebagai kekalahan politik bagi sayap kanan sehingga menimbulkan kemarahan yang mendorong aktivitas protes dari kalangan tersebut. Akan tetapi Donald Trump yang dapat dikatakan sebagai sayap kanan juga mengalami pola yang serupa seperti Barack Obama.

Mengacu pada berbagai penelitian terdahulu, ditemukan bahwa konflik sosial akan selalu ada di dalam masyarakat. Pesta demokrasi berupa pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, pada dasarnya merupakan agenda politik yang menjunjung tinggi hak masyarakat untuk memilih dan dipilih. Beragam identitas dan kepentingan sangat dipertaruhkan pada periode ini dan konflik sangat rawan untuk terjadi. Penelitian terdahulu telah membuktikan proses dan carut marutnya pesta demokrasi yang terjadi di seluruh dunia. Meski demikian, masih sedikit penelitian yang dapat menjelaskan terkait dalang di balik semua konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Muncul sebuah pertanyaan penelitian, “apakah demokrasi dapat menyelesaikan atau justru memperparah konflik sosial di dalam masyarakat?” Studi ini akan berfokus pada mobilisasi massa yang disebabkan oleh ke-“liar”-an demokrasi berupa politisasi agama. Polarisasi masyarakat Indonesia dan gerakan kelompok yang berujung pada gerakan politik praktis pada sejarah demokrasi Indonesia akan dijabarkan lebih lanjut. Studi ini

berusaha untuk menjelaskan konflik sosial dan mobilisasi massa yang pernah terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dalam perspektif kriminologi dengan berusaha untuk membuktikan keterkaitan antara politik identitas, konflik sosial, dan mobilisasi sumber daya untuk gerakan sosial yang destruktif. Alasan pemilihan studi kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah: (1) konflik sosial yang melibatkan mobilisasi massa yang sangat besar pada masanya, (2) konflik ini memiliki kaitan yang erat dengan lingkup sosial dan politik sehingga sulit dipisahkan, dan (3) banyaknya studi terdahulu yang dapat menjelaskan kajian secara utuh. Studi ini diharapkan dapat mencegah pengulangan fenomena politik identitas pada pesta demokrasi selanjutnya, khususnya pada Pemilihan Umum 2024 yang akan diselenggarakan sebentar lagi.

Tinjauan Literatur

Teori Konflik

Teori konflik telah menjadi ilmu sosiologi yang telah dikaji secara umum. Hamon (2016) menyatakan bahwa teori konflik telah mengakui keberadaan kekuatan yang saling bertentangan. Konflik ada dalam setiap lapisan masyarakat. Konflik personal dan keluarga dalam skala mikro, sedangkan konflik sosial merupakan dalam skala makro. Oberschall (1978) telah menyatakan bahwa ruang lingkup teori konflik harus bisa menjelaskan beberapa permasalahan mendasar, yaitu:

1. Sumber konflik sosial secara struktural, yaitu menyangkut perihal dominasi dan pertarungan terkait nilai dan sumber daya yang terbatas.
2. Pembentukan kelompok yang berkonflik dan mobilisasi tindakan kolektif untuk menantang kelompok lain serta mendapatkan tujuan mereka.
3. Dinamika dari konflik, yaitu menyangkut proses interaksi antar kelompok, bentuk konflik, besarnya ruang lingkup, durasi, dan lain sebagainya.

Dapat dipahami bahwa teori konflik pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan sebuah konflik sosial dari akar hingga ke puncak permasalahan. Solusi dari sebuah konflik sosial dapat dilihat dan dipahami jika seorang analis melakukan kajian hingga ke akar rumput masalah. Oleh karena itu, asumsi teoritis dari teori konflik terdiri dari tiga bagian dalam rangka menjelaskan akar masalah konflik yang mengacu pada Hamon (2016), yaitu:

1. Manusia adalah makhluk yang mementingkan diri sendiri (*humans are self-interested*)

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois dan sangat berharap. Dengan keadaan seperti itu, manusia berusaha untuk mencari keamanan, pengakuan, dan status yang dapat dihargai oleh orang lain. Kebutuhan ini mendorong individu untuk berkompetisi dengan individu lain dan mendapatkan apa yang mereka inginkan.

2. Masyarakat beroperasi karena adanya kelangkaan sumber daya yang berkelanjutan (*societies operate under a perpetual scarcity of resources*)

Manusia membutuhkan beragam sumber daya untuk melanjutkan kehidupannya, tapi sering kali tidak dapat dipenuhi karena kelangkaan sumber daya. Hal ini menimbulkan instabilitas, dinamika, dan perubahan sosial dengan dorongan untuk mengelola keterbatasan sumber daya tersebut.

3. Konflik telah meresap dan tidak dapat dihindari (*conflict is pervasive and unavoidable in social groups and between social groups*)

Individu akan bergabung ke dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini menimbulkan dua potensi konflik, yaitu internal kelompok dan eksternal dengan kelompok kepentingan lain.

Coser (1956) menjabarkan fungsi dari konflik sosial secara lebih spesifik, dengan argumen bahwa konflik merupakan sebuah mekanisme pemeliharaan batas-batas kelompok. Spektrum utama dalam kelompok sosial menurut Coser (1956) adalah *in-group*, *out-group*, dan solidaritas kelompok atau komunitas. Titik berat pembahasan konflik sosial menurut Coser pada akhirnya bertumpu pada internalisasi kelompok dan ancaman eksternal yang berdampak pada tindakan kolektif sebagai aksi solidaritas kelompok. Meski demikian, Luloff (2019) menyaran bahwa setiap komunitas pada dasarnya terlibat dalam beragam konflik dan konsensus yang diakui secara umum. Hubungan berupa ikatan primer setiap anggota dalam satu kelompok mungkin saja dangkal, formal, dan/atau impersonal, tidak ada yang berkontribusi secara nyata untuk kerja sama atau komunitas. Meski demikian, komunitas dapat dikatakan sebagai sebuah sistem sosial yang responsif terhadap lingkungan sosial tertentu.

Groupthink dan Resource Mobilization Theory

Janis (1972) mempublikasikan karyanya mengenai "*groupthink*", atau pikiran kelompok. Pikiran kelompok ini mengacu pada pencarian pembenaran dan persetujuan, serta pengujian realitas atas suatu tindakan yang dilakukan oleh individu ke dalam kelompok. Intinya, pikiran kelompok di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota kelompok tersebut sebagai hasil dari sosialisasi dan penyatuan nilai-nilai yang ada di dalam kelompok tersebut. Apa yang dipikirkan dan tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut masuk ke dalam masing-masing anggota dan anggota tersebut melakukan hal tersebut. Bila sampai terjadi pada sebuah konflik, maka kelompok akan cenderung tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk konflik selanjutnya, terlalu

optimis dan bahkan cenderung melebih-lebihkan kemungkinan keberhasilan, serta memilih untuk menggunakan cara-cara koersif karena mempercayai moral superioritas kelompok yang akan berakibat pada: pengambilan tindakan yang tidak manusiawi melawan kelompok luar, mengabaikan konsekuensi moral dari tindakan.

Henriques (2020) menyatakan bahwa banyak elemen yang dapat memengaruhi dinamika pemikiran kelompok, khususnya dalam lingkungan politik, emosi, dan kejadian yang terhiperpolarisasi. Salah satu karakteristik utama pemikiran kelompok adalah kegagalan dalam mempertimbangkan perspektif alternatif dalam rangka menjunjung keharmonisan dan persatuan. Hal ini pada akhirnya berdampak pada pengambilan keputusan yang sangat bermasalah, seperti gegabah, tidak rasional, dan hanya mementingkan salah satu kelompok saja. Keadaan seperti ini dapat dikatakan “buta” terhadap realitas lain yang melekat pada lingkungan sosial dengan adanya pembenaran atau justifikasi tertentu.

Perkembangan *groupthink* selanjutnya adalah aksiologi yang dapat dijelaskan melalui *Resource Mobilization Theory*. Mobilisasi di sini mengacu pada proses dimana anggota-anggota kelompok secara individu menyerahkan diri, dirakit ulang sesuai dengan keinginan kelompok, dan berkomitmen untuk bergerak mendapatkan tujuan dan membela kepentingan kelompok (Almeida, 2019). Tingkat dan bentuk tindakan kolektif yang diambil dalam rangka mendapatkan tujuan kolektif di sini tergantung pada tingkat mobilisasi dan rancangan aksi kolektif. Meski demikian, teori ini akan membuat orang sedikit tidak puas karena keinginan yang kuat, kesadaran kelompok, daya tarik ideologis, dan solidaritas di dalam konflik kelompok akan diturunkan menjadi tempat kedua. Sebab mengapa terjadinya suatu hal atau gerakan di sini membutuhkan antusiasme dan kesetiaan yang besar. Namun, beberapa gerakan ini hanya mampu memberikan kepuasan tersendiri yang lebih kepada orang yang baru bergabung daripada yang lain, atau yang telah lama bergabung.

Politik, Identitas, dan Politisasi Identitas Tertentu

Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang segala keputusan penting telah didasarkan pada kesepakatan mayoritas masyarakat dewasa secara bebas (Sulisworo, dkk., 2012). Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kelompok-kelompok kepentingan yang mewakili masyarakat untuk memperjuangkan suara mereka di dalam parlemen. Oleh sebab itu, muncul beragam partai politik dengan beragam kepentingan yang diusung. Kepentingan ini didasarkan pada beragam alasan yang salah satunya adalah identitas. Identitas sering kali diasumsikan secara implisit sebagai hal internal yang stabil di dalam ilmu politik. Meski demikian, studi-studi terbaru menyatakan bahwa identitas juga dapat bersifat eksogen di dalam ilmu politik kontemporer, atau berasal dari luar ilmu politik (Egan, 2019). Dapat disimpulkan bahwa politik dan identitas dalam hal

ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Identitas dapat berasal dari dalam politik itu sendiri, dan identitas di sisi lain juga telah terbukti dapat muncul dari luar untuk memengaruhi kontestasi politik suatu wilayah.

Identitas dapat didefinisikan sebagai kategori sosial yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan atribut yang dimiliki oleh individu sebagai tanda keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Identitas sendiri memiliki dua sifat: (1) tetap dan/atau sulit untuk diubah, seperti ras, jenis kelamin, warna kulit, dll.; serta (2) melekat namun dapat berubah secara perlahan, seperti bahasa, status ekonomi, dan agama (Egan, 2019). Identitas dalam hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu atribut yang melambangkan kepentingan tertentu. Seperti misalnya Presiden Amerika Serikat ke-44 dan ke-46, Barack Obama dan Joe Biden, yang mewakili kepentingan Sayap Kiri (sosialisme) atau Partai Demokrat. Sedangkan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-45, yang mewakili Sayap Kanan (liberalisme) atau Partai Republik. Setiap presiden ini memiliki identitas khusus yang melekat, seperti misalnya Obama dengan identitas ras berupa Afrika Amerika. Fakta ini akhirnya menimbulkan pergolakan politik pada kancah pemilihan presiden Amerika Serikat 2016. Masyarakat Amerika Serikat berduyun-duyun mengalihkan dukungannya pada Partai Republik.

Norton (2019) menyatakan bahwa hal ini dapat terjadi karena adanya interpretasi pemilih terhadap koalisi simbolik pada saat kompetisi elektoral. Koalisi simbolik adalah apa yang dimaksud oleh kandidat, terdiri dari simbol-simbol yang melekat pada individu setiap kandidat. Dengan kata lain, politik dan identitas menjadi dua entitas yang sangat sulit untuk dipisahkan. Beragam kepentingan yang harus dan/atau ingin diwakilkan dalam ranah *power house* politik telah melekat dalam identitas tertentu. Pemilih atau *voters* pada akhirnya memilih perwakilan politiknya melalui koalisi simbolis, yang salah satunya adalah identitas. Hal ini disebabkan oleh standar “kesepakatan mayoritas” yang melekat pada sistem politik demokrasi. Simbol identitas pada akhirnya bermuara pada pemikiran kelompok dan kepentingan kelompok tertentu yang mengikutinya. Hingga akhirnya kepentingan suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain sebagai salah satu fenomena dinamika kepentingan politik yang dapat tereskalasi menjadi konflik sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan dalam rangka mempelajari dan memahami partisipasi individu atau kelompok serta ciri-ciri mereka dalam rangka menjabarkan keadaan sosial yang nyata (Champion, 2006). Sumber data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan berupa berita daring, buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan fenomena yang diangkat yaitu konflik sosial akibat politisasi agama. Analisis akan dilakukan secara deskriptif,

yaitu menjabarkan keterkaitan data dengan teori yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Konflik sosial didefinisikan oleh Coser (1964) sebagai pertarungan atas nilai atau untuk memperoleh hak atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka dengan tujuan tidak hanya untuk mendapatkan nilai yang diinginkan tersebut, tetapi juga untuk menetralkan, menyakiti, atau menghilangkan lawannya. Dapat dilihat bahwa konflik sosial dilakukan karena ada unsur keuntungan yang bisa didapatkan secara praktis, atau langsung, bila dilakukan. Keuntungan ini bergantung dari alasan mengapa konflik itu dapat terjadi, yaitu realistis atau tidak. Konflik realistis muncul saat seseorang berselisih untuk mengejar menuntut haknya dan memiliki harapan untuk memperoleh keuntungan. Konflik tidak realistis muncul dari tindakan impulsif yang agresif untuk berekspresi tidak peduli apa objek atau tujuannya. Oleh karena itu, konflik tidak realistis ini memiliki alternatif fungsional untuk targetnya. Hal ini berkebalikan dengan konflik realistis, dimana alternatif fungsional ini telah ada dari awal yang memiliki sarana untuk digunakan. Perilaku negatif tidak pasti berakhir menjadi konflik, walaupun hal ini juga terkadang hanya menjadi sumber potensial dari konflik semata.

Dampak dari konflik dapat bervariasi bergantung pada tipe struktur sosialnya. Pada kelompok sosial yang terstruktur secara longgar dan di dalam masyarakat yang terbuka atau pluralistik, konflik di sini memiliki tujuan untuk menyeimbangkan fungsi dan tensi di antara para aktornya. Bila pengekspresian persaingan untuk memperebutkan sesuatu diperbolehkan, maka konflik bisa menjadi alat untuk menghilangkan alasan perpecahan dan menjadi alat untuk membangun kembali persatuan. Di dalam kelompok yang memiliki struktur fleksibel, terdapat beberapa afiliasi dari individu yang menyebabkan mereka berpartisipasi ke dalam kelompok yang bervariasi memungkinkan mereka untuk bersilangan antara satu dengan yang lain yang pada akhirnya mencegah perpecahan di dalam satu poros. Asosiasi yang plural di dalam suatu masyarakat ini akan mengarahkan pada konflik yang plural yang intensitas terjadinya relatif rendah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa konflik di dalam kelompok masyarakat ini akan menjadikan masyarakat yang plural menjadi satu kesatuan.

Hal ini menjadi berbeda pada masyarakat yang kaku dan pada kelompok sosial yang tertutup. Bila konflik yang terjadi ini semakin intens maka akan semakin banyak pihak yang terlibat, dan kelompok ini cenderung menghambat untuk menjadi terbuka karena kebencian. Kelompok tertutup ini cenderung untuk menyerap kepribadian setiap anggotanya secara menyeluruh. Keterlibatan anggota yang mendalam dan hubungan intim di antara mereka kemungkinan akan menyebabkan banyak permusuhan dan ambivalensi. Sehingga bila konflik terjadi di dalam

kelompok yang telah berusaha untuk mencegah hal tersebut maka konflik ini kemungkinan besar akan menjadi intens karena: (1) penyerapan kepribadian di dalam kelompok seperti itu cenderung untuk mengoptimalkan mobilisasi semua energi psikis di dalam melakukan perjuangan, (2) konflik-konflik ini sekarang tidak mungkin tetap sebatas isu-isu yang ada tapi juga untuk menghidupkan kembali semua keluhan yang ditolak sebelumnya. Hal sejenis terjadi di dalam struktur kelompok sosial yang besar yang diatur dalam pola kesatuan dan kaku dimana konflik yang terjadi memiliki kemungkinan besar untuk terjadi dengan intens.

Konflik dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perjuangan atas nilai dan pandangan yang diyakini oleh seseorang maupun suatu kelompok sosial tertentu. Perjuangan secara ideologis yang melampaui hal-hal yang bersifat individual memungkinkan para peserta untuk memiliki hati nurani yang baik dalam memilih cara perjuangan mereka. Oleh karena itu, individu yang melihat diri mereka bertindak sebagai perwakilan ini berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk memperjuangkan cita-cita kelompok yang direpresentasikannya sehingga cenderung untuk menjadi lebih radikal dan tanpa belas kasihan dibandingkan orang yang berjuang untuk kepentingannya sendiri.

Individu dengan identitas yang sama telah bergabung dalam suatu kelompok sosial pada akhirnya memiliki kesamaan nilai, pikiran, dan tujuan dari setiap anggota sebagai akibat dari sosialisasi dan interaksi antar anggota. Hal ini menimbulkan dampak penyatuan nilai-nilai yang ada di dalam kelompok tersebut dan dapat dikatakan sebagai fenomena *groupthink*. Untuk memperjuangkan pikiran kelompok beserta seluruh kepentingannya, terjadi mobilisasi kelompok. Setiap anggota kelompok dalam konteks ini secara sukarela telah menyerahkan diri untuk dirakit ulang sesuai kepentingan kelompok serta berkomitmen untuk membela kepentingan kelompok secara kolektif.

Permasalahan muncul pada saat pikiran kelompok ini menjadi dominan dan menggantikan pemikiran kritis yang independen di dalam membuat kebijakan ataupun melaksanakan kewajiban yang membutuhkan kenetralan karena terdiri dari berbagai macam kelompok. Pikiran kelompok ini akan bersifat subjektif dan tidak jarang hanya menguntungkan kelompok tersebut dan segelintir kelompok lain. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa pikiran kelompok ini akan menghasilkan tindakan irasional dan kurang manusiawi terhadap kelompok luar. Pengekspresian pikiran subjektif dan irasional yang dinyatakan secara berkelompok akhirnya menjadi sebuah mobilisasi massa yang dominan, tanpa peduli kebenaran yang sebenarnya.

Mobilisasi massa dapat terjadi secara sporadis, yaitu terjadi di beberapa tempat saja, tidak diduga-duga, dan memiliki dampak kerusakan yang lebih besar daripada

dugaan awal. Hal ini terjadi pada salah satu kejadian yang cukup kontroversial dan menyita perhatian khalayak umum hingga komunitas mancanegara, yaitu fenomena politik identitas dalam bentuk politisasi agama pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Berbagai kanal seperti berita, media sosial, televisi lokal, dan masih banyak media yang lain telah memberitakan sebuah aksi intoleransi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu jelang Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Dalam hal ini, pihak pertama adalah masyarakat yang beragama Islam dengan FPI sebagai penggerak massa ini membentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, atau dapat disingkat menjadi GNPF-MUI. Pihak kedua adalah Gubernur DKI Jakarta nonaktif pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Mengutip dari BBC Indonesia (2016), kasus ini bermula dari pidato yang dilakukan oleh Ahok pada saat ia meninjau program pemberdayaan budi daya ikan kerapu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Pidato yang diberikan pada tanggal 27 September 2016 yang pada saat itu dianggap menistakan agama ini dicuplik oleh Buni Yani pada tanggal 6 Oktober 2016 dan diunggah ke akun Facebooknya dengan sedikit ubahan. Setelah itu Front Pembela Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan sejumlah organisasi lain mulai melakukan laporan kepada polisi atas dugaan penistaan agama. Muncul beberapa kali demonstrasi yang menuntut hukuman bagi Ahok.

Dari kasus ini juga muncul aksi-aksi intoleran yang terjadi di masyarakat. Muncul larangan bagi warga untuk mensholatkan tetangganya yang meninggal bila memilih Ahok pada Pilkada, ujaran kebencian, tiga aksi demonstrasi dengan skala besar yang diberi nama Aksi Bela Islam, membedakan antara masyarakat beretnis Tionghoa dengan masyarakat ras atau etnis lain, melabel Ahok sebagai penista agama, dan masih banyak lagi. Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta di sini selalu ditolak oleh FPI karena alasan latar belakang agama (Affan, 2016).

Pada Aksi Bela Islam, diakui oleh KH Bachtiar Nasir, Ketua GNPF-MUI, bahwa setidaknya aksi tersebut dapat menghimpun massa hampir 200.000 orang dan memakan total biaya hingga lebih dari 100 miliar rupiah (Rimawan, 2016). Dana tersebut juga dikatakan olehnya berasal dari donatur, yaitu seluruh masyarakat Indonesia yang ingin menuntut supremasi hukum untuk mendapatkan keadilan atas kekecewaan terhadap pernyataan Ahok. Dana yang melebihi 100 miliar rupiah ini diakui oleh Ketua GNPF-MUI digunakan untuk penyedia dapur umum dan penunjang kesehatan.

Saat orasi, salah satu pimpinan aksi yang berorasi ini terkesan memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk menghukum Ahok yang dilabel mereka sebagai penista agama. Ia mengatakan, "*Kalau Ahok tidak ditahan juga, maka jangan kaget kalau Jokowi yang kita tumbangkan. Sudah tiga kali diingatkan*

dengan damai, jika tidak didengarkan maka kita revolusi," yang disambut oleh pekikan takbir para peserta yang mengikuti aksi demo 212 tersebut (BBC Indonesia, 2017).

Walaupun begitu, aksi ini tidak diikuti oleh dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ditambah lagi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Rais Aam, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, juga mengatakan bahwa aksi 212 ini bersifat politis (Aziz, 2017). Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum MUI ini, memang terdapat dua kandidat Gubernur DKI Jakarta yang diuntungkan. Kedua kandidat tersebut adalah pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni. Masalah intoleransi ini semakin menguat pasca Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, di mana hanya terdapat dua kandidat Gubernur DKI Jakarta. Kedua pasangan tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan – Sandiaga Uno.

Akibat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ini, Jakarta ditetapkan sebagai kota paling intoleran di Indonesia berdasarkan kajian dari Setara Institute bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). DKI Jakarta dikatakan mendapatkan skor toleransi terendah oleh Halili, Peneliti Setara Institute, karena setidaknya telah terjadi 14 peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sejak November 2016 sampai Oktober 2017 (Berita Satu, 2017).

Idealnya, pada saat seseorang ingin menentukan sesuatu yang akan dilakukan maka ia akan menggunakan akal sehat dan perasaannya. Akal sehatnya di sini berperan di dalam melihat apa saja kemungkinan yang dapat terjadi bila melakukan hal tersebut, hal apa yang mendasari hingga tindakan tersebut ingin saya lakukan, dan alasan-alasan logis lainnya. Perasaannya di sini memiliki peran untuk menentukan apa yang ingin dilakukan berdasarkan situasi yang kurang atau bahkan tidak logis, misalkan perasaan, pola pikir. Tidak jarang pula perasaan dijadikan penentu keputusan sepihak oleh orang-orang. Keputusan sepihak inilah yang akan menyebabkan konflik dan perpecahan di masyarakat karena hal ini dipicu oleh hal-hal negatif yang dirasakan oleh orang-orang.

Konflik yang terjadi dalam fenomena ini adalah konflik antar kelompok. Coser (1956) berpendapat bahwa konflik ini akan mengakibatkan penyatuan antar anggota di dalam kelompok tersebut. Di dalam kelompok yang ikatannya kuat, ditandai dengan adanya interaksi dengan frekuensi dan keterlibatan kepribadian yang tinggi dari anggota, maka kelompok tersebut memiliki kecenderungan untuk menekan konflik. Dengan begitu, konflik dengan kelompok lain akan memiliki manfaat untuk menguatkan ikatan para anggota di dalam suatu kelompok yang sama.

Contoh, kelompok A memiliki masalah dengan kelompok B. Maka konsekuensi untuk mengalahkan kelompok B yaitu dengan cara anggota kelompok A bersatu dan memperkuat dirinya sampai bisa mengalahkan kelompok B dan begitu pula sebaliknya. Maka konsep *in-group* dan *out-group* di sini sangat penting, yaitu digunakan sebagai identitas diri dan kelompok.

Secara umum, tindakan-tindakan tersebut dipandang sebagai tindakan membela Islam oleh para pengikut aksi tersebut. Berbagai macam tindakan dilakukan dengan pandangan bahwa itu merupakan ajaran agama dan itulah yang harus saya dan orang lain lakukan. Tindakan-tindakan ini pada akhirnya berubah menjadi tindakan intoleransi demi mencapai apa yang diinginkan oleh oknum-oknum tersebut. Apa yang dilakukan oleh GNPf-MUI bersama dengan simpatisannya memiliki tujuan nyata yaitu untuk menghukum penista agama, atau Ahok. Bila melihat dari kasus tersebut maka terdapat kesempatan untuk memperoleh hak atas status dan kekuasaan dengan standar kemenangan apabila Ahok berhasil dihukum. Dengan dihukumnya Ahok, maka para anggota kelompok ini menganggap bahwa Islam yang dimenangkan. Melalui Ahok pula sehingga terbentuk sebuah kelompok yang memperkuat ikatan antar anggota *in-group* tersebut

Dalam kasus di atas, perasaan merupakan faktor yang paling banyak berperan di dalam menentukan sebuah keputusan. Perasaan bahwa Ahok telah menistakan Islam, perasaan bahwa Ahok merugikan saya, perasaan bahwa Ahok adalah kafir, dan banyak perasaan-perasaan lainnya yang muncul di dalam benak para pihak oposisi dari Ahok. Bila digambarkan secara sederhana, maka alasan yang menjadi dasar terjadinya konflik ini adalah emosi negatif yang diarahkan pada seseorang. Kebencian, ketidakpuasan, kekecewaan, dan emosi atau perasaan negatif yang dirasakan oleh orang banyak hingga akhirnya menimbulkan konflik tersebut.

Ahok dan kelompok pendukungnya di sini dapat dianggap sebagai *out-group*, atau kelompok eksternal yang dianggap mempersatukan umat Islam. Hal ini dikarenakan Ahok dilihat sebagai ancaman, perusak, penista, dan label-label negatif lain yang diberikan oleh oknum-oknum tersebut terhadap dirinya. Sejalan dengan Coser, pidato Ahok di Kepulauan Seribu ini membentuk identitas kelompok dirinya dan kelompok “Islam” yang tidak suka dengan dirinya. Pembentukan identitas ini juga berakibat pada semakin menguatnya ikatan para anggota kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Terlihat bahwa oknum-oknum ini semakin santer menggembar gemborkan keinginan untuk menghukum Ahok, penggunaan atribut serba putih agar terkesan “Islami”, dan masih banyak lagi. Di pihak lain, para pendukung Ahok juga menyuarakan keinginan mereka untuk mendukung Ahok, tuntutan kelompok sebelah sangat tidak rasional dan dapat mencederai demokrasi, menggunakan atribut kemeja kotak-kotak, dan lain-lain.

Gerakan Aksi Bela Islam ini diawali oleh FPI yang selanjutnya semakin membesar hingga membentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, atau GNPF-MUI, untuk mengawal kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok. Massa yang tergabung di sini kurang lebih memiliki pola pikir yang sama dengan GNPF-MUI. Mereka menganggap bahwa Ahok telah menistakan agama Islam dengan mengatakan bahwa umat Islam telah dibohongi oleh Surat Al-Maidah ayat 51. Dengan amunisi ini lah pihak-pihak yang memang dari awal tidak suka kepada Ahok menjadi memiliki alasan untuk melawan Ahok sekaligus mengumpulkan massa untuk mendukung aksi perlawanannya. Para anggota dan pimpinan di dalam GNPF-MUI dan FPI ini mencari sebuah pembenaran dan persetujuan atas aksi yang ingin dilakukan ke dalam kelompok mereka terlebih dahulu. Setelah masyarakat menjadi termakan oleh isu penistaan agama, maka secara tidak langsung, dan tidak sadar, mereka sudah tergabung ke dalam kelompok FPI dan GNPF-MUI. Dikatakan demikian karena pemimpin dan anggota awal kedua kelompok tersebut pada akhirnya mencari pembenaran dan persetujuan dari masyarakat untuk melakukan aksinya. Hal ini ditandai dengan ajakan yang diberikan melalui berbagai macam cara, salah satunya dakwah, dan omongan masyarakat dan hal ini disambut dengan baik pula oleh masyarakat dengan bukti bahwa setidaknya telah terjadi Aksi Bela Islam dengan massa yang besar. Selain massa yang besar, Aksi Bela Islam ini juga memakan biaya yang sangat besar pula.

Sejalan dengan konsep pikiran kelompok milik Janis, Ketua GNPF-MUI di sini terkesan sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh umat Islam sehingga dapat memenjarakan penista agama. Ia membeberkan bahwa total biaya yang dikeluarkan mencapai 100 miliar rupiah dan dia dengan bangga mengakui bahwa dana tersebut didapat dari seluruh masyarakat Indonesia. Uang sejumlah 100 miliar rupiah bukanlah jumlah uang yang sedikit, dan total pengeluaran Aksi Bela Islam melebihi dari nominal tersebut hanya untuk dapur umum dan penunjang kesehatan pada saat Aksi Bela Islam berlangsung. Tentu hal ini harus dipertanyakan, sebanyak apakah perut yang harus diisi atau fasilitas penunjang kesehatan macam apa yang dibutuhkan oleh para peserta Aksi Bela Islam dalam mempersiapkan, melakukan, dan pasca aksi tersebut berakhir. Selain pikiran kelompok, *mobilization theory* di sini juga terpenuhi. Kelompok merakit ulang pola pikir tiap-tiap individu yang pada awalnya bukan merupakan anggota dari kelompok tersebut dengan cara melakukan khutbah di masjid-masjid, pengajian, dakwah, dan lain-lain (Minan dan Rizki, 2019).

Seseorang tidak secara otomatis tergabung ke dalam gerakan aksi 411 dan 212 jika dirinya memeluk agama Islam. Meski demikian, secara tidak langsung ia telah menjadi target kelompok tersebut untuk menghimpun massa yang banyak sekaligus mencari pembenaran atas apa yang ingin dilakukan oleh kelompok tersebut. Secara

umum, konflik ini mengatas namakan umat Islam dalam melaksanakan aksi-aksinya. Dengan begitu, kelompok ini mengincar orang-orang yang beragama Islam untuk menjadikan mereka anggota kelompok tersebut dalam rangka mendapatkan dukungan. Orang yang telah “menyerahkan dirinya” atau setuju pada sentimen negatif terhadap Ahok akan lebih mudah untuk dibentuk pikirannya oleh kelompok tersebut. Indikator keberhasilan dari “perakitan ulang” ini yaitu orang yang telah berhasil didekonstruksi pola pikirnya sehingga ia mau mengikuti visi misi, program, dan membela kepentingan kelompok tersebut. Secara nyata, orang yang telah dikatakan berhasil didekonstruksi adalah orang yang emosinya paling kencang untuk membela kelompok tersebut dengan dalih membela agama.

Penutup

Masyarakat akan selalu terpecah belah dengan konflik sosial. Politik dalam kasus ini telah menggunakan identitas sebagai salah satu amunisi untuk mewujudkan hal tersebut. Krisis akan menciptakan lahan subur bagi polarisasi masyarakat karena warga atau kelompok kepentingan yang terdampak langsung akan mencari solusi instan, dan secara bersamaan akan mendorong spektrum politik yang lebih ekstrem (Exadaktylos, 2020). Apa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ini menciderai pesta demokrasi yang telah berlangsung lama di negeri ini. Pesta demokrasi yang diwarnai dengan isu SARA ini membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia sangat mudah terprovokasi dengan isu-isu sensitif semacam SARA sebagai sebuah perwujudan identitas kepentingan suatu kelompok sosial tertentu. Apa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 sudah seharusnya menjadi pelajaran bahwa kita sebagai masyarakat harus membuka diri dan lebih mau mendengarkan orang lain terlebih dahulu sebelum mempersekusinya. Hal ini perlu dilakukan agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari.

Kasus penistaan ini sekilas terlihat seperti konflik yang realistis dimana para peserta aksi menuntut hak dan memiliki harapan untuk memperoleh keadilan. Selain itu, konflik ini sejak awal telah memiliki alternatif fungsional dan memiliki sarana untuk digunakan, yaitu hukum yang berlaku untuk mengadili Ahok. Namun, kasus ini sebenarnya lebih cenderung kepada konflik tidak realistis. Hal ini dibuktikan melalui ujaran-ujaran kebencian yang dilontarkan, terhadap penista agama dan terkadang pada orang-orang Kristiani atau beretnis Tionghoa, serta dengan tujuan untuk mendiskreditkan mereka. Tindakan intoleransi yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ini telah membuka jalan bagi masyarakat untuk menjadi intoleran terhadap orang lain yang bukan beragama Islam dan lebih militan terhadap Islam. Tindakan ini juga masih berlangsung sampai saat ini, termasuk Pemilihan Umum 2019, walaupun tidak sekencang pada saat Pilkada 2017.

Pilkada DKI Jakarta 2017 pada kenyataannya memunculkan elemen *in-group*, *out-group*, dan solidaritas dari masing-masing kelompok sosial sebagai sebuah usaha untuk menyuarakan serta memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Besarnya dukungan dan tekanan antar kelompok yang terjadi secara bersamaan telah menyebabkan konflik yang besar dalam masyarakat. Politik identitas, khususnya politisasi agama, telah menjadi momok menakutkan bagi sebagian kalangan, berupa munculnya spanduk-spanduk provokatif dan penolakan sholat jenazah bagi pendukung Ahok (Sunariyah, 2017). Kejadian ini menimbulkan kendala bagi warga DKI Jakarta untuk menyalurkan hak politik mereka sesuai dengan asas Luber Jurdil: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Partisipasi politik warga negara akhirnya dibatasi oleh konflik sosial. Hal ini serupa dengan kajian di yang dilakukan oleh Córdova (2019), di mana partisipasi politik yang didominasi oleh kelompok tertentu akan mengakibatkan demokrasi yang timpang dan rawan diatur oleh kelompok dominan dalam skala mikro. Pengalaman viktimisasi individu dalam hal ini juga berpengaruh terhadap pilihan seseorang untuk terlibat dalam tindakan non-elektoral, atau golongan putih.

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi justru memberikan dampak eskalasi konflik sosial yang lebih masif di dalam masyarakat. Identitas dan kepentingan warga negara yang beragam menimbulkan kewajiban bagi setiap individu untuk terafiliasi dalam sebuah kelompok dalam rangka menyampaikan kepentingannya. Sekilas terlihat indah, namun polarisasi kepentingan dari masing-masing kelompok berkepentingan pada akhirnya menjadi lahan subur bagi terwujudnya konflik sosial dalam masyarakat. Fenomena ini diperparah oleh beragam partai politik yang berusaha menunggangi isu-isu tersebut dalam rangka mencapai tujuan kelompoknya sendiri. Konflik besar dan parah merupakan dampak langsung yang sudah sangat sering dikaji. Meski demikian, terdapat efek samping yang sering kali terlewat, berupa ancaman perpecahan yang laten seperti opresi, ketidaksukaan, kebencian, pengeksklusifan, dan lain sebagainya. Ancaman laten ini merupakan bara api yang tidak mungkin hilang dan sangat mudah untuk disulut kembali di masa depan.

Diskusi

Fenomena politik identitas merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah kajian menarik yang dilakukan oleh Braunstein (2019) menyatakan bahwa perhatian masyarakat Amerika Serikat tentang terorisme global telah memunculkan pertanyaan besar berupa “apakah umat Muslim dapat dikatakan sebagai orang Amerika atau ancaman bagi budaya dan keamanan negara”. Pertanyaan ini telah menjadi tema dominan bagi kedua partai politik Amerika Serikat, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2016. Partai Demokrat berfokus pada retorika toleransi agama dan inklusi multikultur. Sedangkan Partai Republik berfokus pada retorika

kemenangan simbolis bagi orang-orang yang mendefinisikan Muslim sebagai *non-American* (orang luar/*out-group*), *anti-American* (musuh/*enemies*), dan *un-American* (berbeda/*others*). Dengan kata lain, identitas agama telah dipolitisasi oleh elit politik dalam rangka mendapatkan simpati dan suara dari masyarakat Amerika Serikat.

Dugan dan Chenoweth (2019) telah melakukan kajian terhadap kontestasi kekuatan antar kelompok yang menggarisbawahi pentingnya mobilisasi oleh kelompok minoritas dan termarginalisasi. Mobilisasi kelompok minoritas dengan segala keterbatasannya harus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menggulingkan kelompok dominan dan memperoleh kemenangan atas kesengsaraan, opresi, dan kepentingan politik kelompok minoritas terkait. Kajian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Berens and Dallendörfer (2019) yang menyimpulkan bahwa terdapat efek positif yang signifikan antara pengalaman viktimisasi terhadap jumlah pemilih. Hal ini dapat diartikan sebagai semakin tinggi viktimisasi yang terjadi, maka semakin tinggi juga jumlah pemilih yang terlibat dalam pemilu atau kegiatan politik lainnya. Peningkatan jumlah pemilih tersebut merupakan salah satu media bagi kelompok minoritas agar dapat bersaing dalam kontestasi kekuatan dengan kelompok dominan. Hal ini mungkin dilakukan karena adanya kemungkinan bahwa kelompok dominan pada dasarnya sangat rentan untuk terfragmentasi.

Mengacu pada argumentasi dan diskusi tersebut, suara dan kepentingan masing-masing kelompok sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat bergantung dengan dominasi kekuasaan. Semakin besar pendukung kepentingan A maka hal tersebut yang akan terwujud dan begitu pula sebaliknya. Pemenuhan hak dan kepentingan masyarakat pada akhirnya hanya sebatas komoditas bagi elit penguasa dan kelompok dominan semata. Politik dalam hal ini dapat dimanfaatkan, disetir, melakukan manuver-manuver yang pada dasarnya ditentukan berdasarkan kepentingan kelompok tersebut. Dinamika dan pertarungan kepentingan ini lah yang menyebabkan konflik sosial tidak akan pernah selesai, dan cenderung akan semakin terekskalasi keparahannya di kemudian hari karena adanya keterbatasan sumber daya yang dapat diakses serta dikelola demi kesejahteraan bersama. Mengutip Winston Churchill (Millet, n.d.), “*democracy is the worst form of government – except for all the others that have been tried*”. Salah satu keburukan demokrasi telah dibuktikan dalam penelitian ini. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya, penulis mengajak untuk melakukan kajian serupa. Masih banyak peluang yang belum dijelaskan dalam konteks ini. Penulis hanya berfokus pada isu konflik, kelompok sosial, dan kejahatan yang disebabkan oleh sistem politik yang buruk. Diharapkan peneliti lain dapat mengembangkan argumen ini dalam kajian ilmu yang berbeda untuk membuka wawasan di masa depan.

Daftar Pustaka

- _____. (16 November 2017). *Jakarta Puncaki Daftar Kota Paling Intoleran di Indonesia*. Berita dikutip dari <http://www.beritasatu.com/nasional/463939-jakarta-puncaki-daftar-kota-paling-intoleran-di-indonesia.html>
- _____. (17 November 2016). *Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka*. Berita dikutip dari www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601
- _____. (21 Februari 2017). *Aksi 212: Rizieq Shihab datang dan menyeru 'penjarakan Ahok'*. Berita dikutip dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39035135>
- Affan, H. (2 Desember 2016). *Apakah Aksi 411 dan 212 Membuat FPI Menjadi 'Besar'?* Berita dikutip dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38169982>
- Almeida, P. (2019). *Social movements: The structure of collective mobilization*. Univ of California Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Aziz, N. (21 Februari 2017). *'Bersifat Politis', NU dan Muhammadiyah Tidak Ikuti Aksi 212 di Depan DPR*. Berita dikutip melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39026197>
- Berens, S., & Dallendörfer, M. (2019). Apathy or anger? How crime experience affects individual vote intention in Latin America and the Caribbean. *Political Studies*, 67(4), 1010-1033.
- Braunstein, R. (2019). Muslims as outsiders, enemies, and others: The 2016 presidential election and the politics of religious exclusion. *Politics of meaning/meaning of politics: Cultural sociology of the 2016 US presidential election*, 185-206.
- Champion, D. J. (2006). *Research methods for criminal justice and criminology (3rd ed.)*. New Jersey, US: Pearson Education Inc.
- Córdova, A. (2019). Living in gang-controlled neighborhoods: Impacts on electoral and nonelectoral participation in El Salvador. *Latin American Research Review*, 54(1), 201-221.
- Coser, L. (1956). *"The Functions of Social Conflict."* New York: Free Press.
- Coser, L. A. (1964). *The Function of Social Conflict*. Toronto: A Free Press Paperback, The Macmillan Company.
- Coser., L. A. (1968). *International Encyclopedia of the Social Sciences, (Volume 3)*. 1968. The Macmillan Company & The Free Press.
- Dugan, L., & Chenoweth, E. (2020). Threat, emboldenment, or both? The effects of political power on violent hate crimes. *Criminology*, 58(4), 714-746.

- Egan, P. J. (2020). Identity as dependent variable: How Americans shift their identities to align with their politics. *American Journal of Political Science*, 64(3), 699-716.
- Exadaktylos, T. (2020). Them and us: The politics of exclusion in Greece in times of polarisation. In *The Emerald Handbook of Digital Media in Greece: Journalism and Political Communication in Times of Crisis* (pp. 275-288). Emerald Publishing Limited.
- Hamon, R. R. (2016). Conflict theory. *Encyclopedia of family studies*, 1-5.
- Henriques, G. (2020). Groupthink and the evolution of reason giving. *Groupthink in Science: Greed, Pathological Altruism, Ideology, Competition, and Culture*, 15-25.
- Janis, I. (1972). *Victims of Groupthink*. Boston: Houghton Mifflin.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133-154.
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12-16.
- Luloff, A. E. (2019). Community and social change: how do small communities act?. *American rural communities*, 214-227.
- Millet, P. (n.d.). *The Worst Form of Government*. Artikel dikutip melalui <https://blogs.fcdo.gov.uk/petermillet/2014/03/05/the-worst-form-of-government/>
- Minan, J., & Rizki, F. F. (2019). Front Pembela Islam (FPI) Sumber Kekuatan Politik Identitas Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. *Jurnal KAPemda: Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 14(8), 1-16.
- Norton, M. (2019). When Voters Are Voting, What Are They Doing? Symbolic Selection and the 2016 US Presidential Election. In: Mast, J.L., Alexander, J.C. (eds). *Politics of Meaning/Meaning of Politics. Cultural Sociology. Palgrave Macmillan, Cham.*, 35-52. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95945-0_3
- Nurhadiyanto, L., & Puspita, P. (2021). Penodaan Agama Ditinjau dari Perspektif Teori Konflik: Studi Kasus Pasal Penodaan Agama di Tanjung Balai. *Deviance Jurnal kriminologi*, 5(1), 20-36.
- Oberschall, A. (1978). Theories of Social Conflict. *Annual Review of Sociology*, 4, 291-315.
- Rimawan, R. "Jumlah Pendemo Ahok 200 Ribu Orang dengan Dana Rp 100 Miliar." (2 November 2016). Berita dikutip dari <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/11/02/jumlah-pendemo-ahok-200-ribu-orang-dengan-dana-rp-100-miliar>
- Scrivens, R., Burruss, G. W., Holt, T. J., Chermak, S. M., Freilich, J. D., & Frank, R. (2021). Triggered by defeat or victory? Assessing the impact of

presidential election results on extreme right-wing mobilization online. *Deviant Behavior*, 42(5), 630-645.

Sulisworo, T. D., Wahyuningsih, D., & Arif, B. (2012). *Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012: Demokrasi*. Universitas Ahmad Dahlan. <http://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf>

Sunariyah. (11 Desember 2017). *Kaleidoskop Politik 2017: Pilkada yang Mengantar Ahok ke Penjara*. Berita dikutip melalui <https://www.liputan6.com/news/read/3192060/kaleidoskop-politik-2017-pilkada-yang-mengantar-ahok-ke-penjara>

Utami, W. W., & Darmaiza, D. (2020). Hate Speech, Agama, Dan Kontestasi Politik Di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 113-128.